

A. Pendahuluan

Pada awal abad ke-20, di Mesir timbul suatu usaha untuk mengakhiri kekuasaan Inggris yang sudah berkuasa sejak tahun 1882. Untuk meredam tuntutan tersebut, akhirnya Inggris memproklamirkan Mesir sebagai Negara Monarki Konstitusional. Mesir dapat bebas mengelola negara dengan ketentuan Inggris masih menguasai empat masalah. Masalah tersebut yaitu masalah Sudan, keamanan Mesir dari intervensi asing, penjamin kepentingan asing dan minoritas, serta pengawasan Terusan Suez.

Mesir yang sudah diberi kebebasan untuk mengelola negaranya sendiri, pada kenyataannya belum merdeka karena Inggris masih memegang kehidupan politik Mesir. Semetara itu, kaum elit Mesir saling bermusuhan satu dengan yang lain. Al-Wafd, yang merupakan partai terbesar di Mesir pada waktu itu sering berselisih paham dengan raja. Hal ini mengakibatkan kepentingan rakyat terbengkalai. Selain itu ada golongan lain yang cukup berpengaruh yaitu al-Ikhwan al-Muslimin (Persaudaraan Muslim) yang didirikan oleh Hasan Al-Bana dan di golongan militer ada juga sekelompok perwira yang ikut dalam roda pemerintahan.

Golongan-golongan tersebut terus bersaing dalam memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Persaingan ini terus berlanjut sampai pada tahun 1952 orang-orang dari golongan militer yang menamakan diri *Free Officers* dibawah komando kolonel Gamal Abdul Nasser melakukan kudeta menjatuhkan kekuasaan raja Farouk. Mesir pun dikuasai oleh rezim militer yang diwujudkan dalam bentuk *Revolution Command Council* (RCC) yang dipimpin oleh Jenderal Muhammad Naguib sebagai panglima tertinggi. Rezim militer di Mesir ini kemudian melakukan beberapa perubahan dalam pemerintahan, salah satunya menghapus sistem monarki di Mesir pada 18 Juni 1953. Setelah itu Jenderal Muhammad Naguib memproklamirkan berdirinya Republik Mesir dan mengangkat diri menjadi presiden sekaligus perdana menteri, sedangkan Gamal Abdul Nasser menjadi deputi perdana menteri dan menteri dalam negeri.

Rezim militer yang berpusat pada dwitunggal Muhammad Naguib dan Gamal Abdul Nasser akhirnya mengalami keretakan dan puncaknya pada Februari

1954, *Revolution Command Council* (RCC) mendesak Muhammad Naguib mundur dan menyerahkan jabatan perdana menteri kepada Gamal Abdul Nasser. Tujuh bulan kemudian yaitu pada November 1954, *Revolution Command Council* (RCC), kembali memaksa Muhammad Naguib untuk menyerahkan jabatan presiden kepada Gamal Abdul Nasser. Sejak saat itu Gamal Abdul Nasser menjadi pemimpin tunggal di Mesir. Gamal Abdul Nasser mempunyai pandangan sendiri tentang masa depan Mesir. Mengenai kebijakan asing misalnya, Gamal Abdul Nasser mempunyai beberapa prioritas yaitu, menghilangkan Inggris dari Mesir, mengeliminasi kekuatan Inggris di dunia Arab, dan ambisi pribadinya untuk menjadikan Mesir sebagai pemimpin dunia Arab.

B. Latar Belakang

Mesir pada masa pemerintahan Gamal Abdul Nasser, hubungan antara Inggris dan Mesir menjadi sangat tegang karena sikap anti-Inggris Gamal Abdul Nasser yang sangat jelas. Puncak ketegangan hubungan antara Inggris dan Mesir terjadi ketika Gamal Abdul Nasser melakukan nasionalisasi Terusan Suez sebagai bentuk reaksi atas dibatalkannya bantuan dana untuk pembangunan Bendungan Aswan oleh Amerika Serikat. Selain untuk membiayai pembangunan Bendungan Aswan, Gamal Abdul Nasser dalam pidatonya tanggal 28 Juli 1956 menyatakan ini sebagai salah satu langkah untuk menuju Mesir yang merdeka sepenuhnya.

Nasionalisasi Terusan Suez yang dilakukan oleh Gamal Abdul Nasser menimbulkan konflik antara Mesir dan Negara Barat. Terusan Suez sangat penting bagi Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Bagi Inggris, terusan suez merupakan penghubung ke koloni Inggris di India, Timur Jauh, Australia, dan Selandia Baru. Konflik yang muncul berubah menjadi perang terbuka ketika Inggris, Perancis, dan Israel melakukan invasi ke Mesir untuk menjatuhkan Gamal Abdul Nasser dari pemerintahan. Walaupun secara militer operasi ini sukses, tetapi tidak secara ekonomi dan politik. Inggris dan Perancis mendapat tekanan politik dan ekonomi dari dunia internasional untuk menghentikan invasi tersebut.

Pihak lain yang terlibat dalam konflik nasionalisasi Terusan Suez adalah Israel. Israel yang merupakan bentukan negara Barat menjadi pemicu konflik

dengan negara-negara Arab yang tidak menerima keberadaan negara tersebut. Setelah Perang Arab pertama tahun 1948, Israel terus mendapat ancaman dari negara-negara Arab sehingga mengharuskan negaranya memimpin kekuatan militer di kawasan tersebut. Sikap permusuhan dan persaingan kekuatan militer diantara Israel dan Mesir menjadikan konflik tidak terhindarkan. Pada tahun 1949 Terusan Suez ditutup bagi kapal Israel dan pada tahun 1955 Mesir melarang kapal Israel melewati Teluk Aqabah yang merupakan jalur laut menuju Laut Merah. Hal ini memjadikan Israel bersama dengan Inggris dan Perancis terlibat dalam konflik nasionalisasi Terusan Suez untuk menjatuhkan Nasser dari pemerintahan.

Peristiwa nasionalisasi Terusan Suez sangat menarik untuk dibahas karena penyebab dan dampaknya begitu kompleks. Banyak faktor yang berperan dalam peristiwa ini, seperti situasi Perang Dingin, nasionalisme Arab, konflik Arab-Israel, dan usaha mempertahankan hegemoni negara Barat di kawasan Timur Tengah. Dalam peristiwa ini terlihat bagaimana kebijakan yang diambil untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing dapat menimbulkan konflik tidak hanya diantara negara rival, tetapi juga diantara negara yang secara tradisional merupakan sekutu yang tidak terpisahkan sejak Perang Dunia II. Hal ini terjadi ketika Amerika Serikat tidak memberikan dukungan terhadap invasi yang dilakukan oleh Inggris dan Perancis ke Mesir, bahkan Amerika Serikat memberikan tekanan politik dan ekonomi terhadap keduanya. Hal yang paling utama adalah peristiwa ini mengubah sejarah Mesir dan kawasan Timur Tengah karena menandai runtuhnya pengaruh imperialisme lama di kawasan tersebut yaitu, Inggris dan Perancis yang digantikan perannya oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet tersebut.

C. Nasionalisasi Terusan Tahun 1956 dan Reaksi Negara-Negara Barat

1. Sekilas tentang Terusan Suez

Terusan Suez terbentang sepanjang 162,5 kilometer antara Port Said di Laut Tengah dan Port Taufik di Laut Merah. Tahun 1852 seorang insinyur Perancis Ferdinand de Lesseps menulis catatan tentang kemungkinan membangun sebuah terusan di Suez yang akan menghubungkan dua laut

setelah mempelajari sejarah transportasi dan rute perdagangan antara Mesir Kuno dengan wilayah-wilayah selatan.

Pada 15 November 1854 Ferdinand de Lesseps mempresentasikan rencananya untuk membangun terusan dengan pelabuhan di tiap ujungnya kepada Said Pasha (memerintah Mesir 1854-1863). Pada akhir November 1854 rencana tersebut disetujui. Sebuah perusahaan *The Universal Company of the Maritime Suez Canal (Suez Canal Company)* didirikan pada tahun 1858 dibawah arahan Ferdinand de Lesseps untuk membangun Terusan Suez, dan merupakan perusahaan multinasional yang terbagi dalam 400.000 saham. Pembangunan dimulai pada 25 April 1859 di tempat yang nantinya menjadi Port Said. Pembangunan Terusan Suez selesai pada 15 Agustus 1869 dengan kedalaman 5 meter, lebar 50-90 meter, dan panjang 160 kilometer yang melewati kota Suez, Ismailia dan Port Said.

Pada 17 November 1869 Terusan Suez dibuka untuk pelayaran yang pengelolaannya diserahkan kepada *Suez Canal Company* berdasarkan konsesi tahun 1866 yang diberikan oleh pemerintah Mesir ketika masih dalam proses pembangunan dibawah Ismail (memerintah Mesir 1863-1879), yang kemudian diratifikasi oleh sultan Turki Ottoman. Pada 1875 pemerintah Mesir menjual 44 persen saham *Suez Canal Company* kepada pemerintah Inggris karena mengalami defisit keuangan. Pada 29 Oktober 1888 Konvensi Konstantinopel yang mengatur status Terusan Suez ditandatangani oleh Inggris, Jerman, Austria, Hungaria, Perancis, Itali, Belanda, Rusia, Spanyol dan Turki. Konvensi Konstantinopel tahun 1888 menghasilkan kesepakatan bahwa Terusan Suez merupakan zona netral yang harus selalu terbuka (baik disaat perang maupun damai) bagi kapal dagang dan kapal perang tanpa membedakan bendera suatu negara (termasuk kapal negara yang sedang berperang).

2. Mesir Masa Gamal Abdul Nasser

Pada 22 Juli 1952, *Free Officers* melakukan kudeta terhadap Raja Farouk dan mengambil alih pemerintahan. Sekitar 3000 pasukan mengambil

alih tempat-tempat strategis seperti bandara, Stasiun Radio, dan Pusat Komunikasi. Kemudian Anwar Sadat yang saat itu merupakan anggota *Free Officers* mengumumkan bahwa pemerintahan telah diambil alih oleh militer. Raja Farouk yang sedang berada di Alexandria tidak bisa berbuat banyak, dan pada 26 Juli 1952 Raja Farouk diminta turun tahta dan meninggalkan Mesir.

Rezim baru dipimpin oleh Muhammad Naguib berdasarkan keputusan *Revolution Command Council* (RCC) yang didominasi oleh para perwira muda. Kebijakan rezim baru ini berdasarkan beberapa tujuan utama yaitu, mengeliminasi pengaruh asing, terutama pengaruh Inggris, Reformasi Tanah, mengakhiri sistem monarki, dan pembersihan korupsi. Pada September 1952 RCC menuduh pemimpin *al-Ikhwan* berkerjasama dengan kekuatan asing untuk menjatuhkan pemerintahan, dan mendeskreditkan *al-Ikhwan* sebagai partai terlarang. Kemudian dengan cepat RCC membubarkan semua partai politik pada Januari 1953. Naguib yang tidak setuju dengan tindakan Nasser dan RCC terhadap *al-Ikhwan* mengakibatkan perpecahan diantara keduanya. Akhirnya RCC meminta Naguib untuk mundur pada November 1954, dengan tuduhan berkonspirasi dengan *al-Ikhwan*. Nasser kemudian mengambil alih posisi Naguib di pemerintahan.

Nasser mempunyai pandangan yang benar-benar baru tentang masa depan Mesir. Mengenai kebijakan asing Nasser mempunyai dua prioritas yaitu, menghapus Inggris dari Mesir, mengeliminasi kekuatan Inggris di Dunia Arab. Salah satu alasan Nasser ingin mengeliminasi kekuatan Inggris di Dunia Arab kemungkinan merupakan ambisi pribadi untuk menjadikan Mesir dan dirinya sebagai pemimpin Dunia Arab.

3. Nasionalisasi Terusan Suez

Nasionalisasi Terusan Suez merupakan tindakan balasan Gamal Abdul Nasser karena dibatalkannya bantuan dari Barat untuk pembangunan Bendungan Aswan. Pada 26 Juli 1956 dia menasionalisasi *Suez Canal Company* dan mengambil alih kontrol Terusan Suez. Setidaknya ada dua alasan mengapa Nasser menasionalisasi Terusan Suez, pertama untuk

mendanai pembangunan Bendungan Aswan, dan kedua ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Mesir merupakan yang berdaulat dan independen, serta bisa mengambil kebijakan tanpa pengaruh dari Barat. Nasser menganggap nasionalisasi Terusan Suez sebagai tantangan terhadap dominasi Barat, langkah untuk menuju Mesir yang independen, dan menambah pendapatan Mesir dari aset-aset strategis. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pemerintahan Inggris. Perdana Menteri Inggris Anthony Eden dalam memoirnya menuliskan bahwa kegagalan untuk menjaga terusan sebagai perairan internasional akan menyebabkan kehilangan seluruh aset Inggris di kawasan tersebut, oleh karena itu mendesak agar tindakan secepatnya segera dilakukan oleh Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat.

Secara hukum, Nasser dapat menasionalisasi *Suez Canal Company* jika membayar kompensasi kepada pemilik sebelumnya. Tujuan Nasser yang berniat menggunakan pendapatan dari *Suez Canal Company* untuk mendanai pembangunan Bendungan Aswan menyebabkan Inggris menganggap Nasser tidak mempunyai niat untuk membayar kompensasi tersebut. Pada 27 Juli 1956 Eden mengirim surat resmi yang menyatakan protes terhadap nasionalisasi Terusan Suez. Eden menyatakan bahwa nasionalisasi Terusan Suez tidak sesuai dengan konsensi antara Inggris dan Mesir, juga melanggar Konvensi Konstantinopel tahun 1888. Eden juga menghubungi Eisenhower melalui surat dan menyatakan Terusan Suez merupakan aset dan fasilitas internasional yang vital bagi dunia internasional, nasionalisasi Terusan Suez bertentangan dengan hukum internasional dan akan segera menjadi ancaman terhadap suplai minyak Barat. Eden menganggap bahwa tekanan ekonomi saja tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah ini dan berharap Amerika Serikat bersiap untuk kemungkinan penggunaan kekuatan bersama dengan Inggris dan Perancis untuk mengembalikan Nasser pada akal sehatnya.

Sikap Inggris dan Eden yang cenderung keras terhadap nasionalisasi Terusan Suez karena bisa dikatakan, Inggris merupakan pihak yang paling berkepentingan dan terkena dampak paling besar dari nasionalisasi tersebut.

Inggris merupakan pemegang saham terbesar *Suez Canal Company*, terlebih sepertiga pelayaran yang melewati Terusan Suez merupakan kapal Inggris. Eden menyatakan di hadapan parlemen Inggris bahwa demi kepentingan nasional, Terusan Suez tidak boleh dipegang oleh satu kekuatan yang bisa mengeksplorasinya.

Di pihak lain, Perancis mempunyai posisi yang mirip dengan Inggris. Perancis setidaknya mempunyai dua kepentingan berkaitan dengan nasionalisasi Terusan Suez. Pertama, Perancis mempunyai kepentingan ekonomi karena memiliki saham *Suez Canal Company* yang membuatnya terkena dampak langsung nasionalisasi yang dilakukan Nasser. Kedua, kepentingan politik yang bahkan lebih penting dari dampak ekonomi yang akan ditimbulkan, yaitu masalah *Front de Libération Nationale* (FLN) yang merupakan pergerakan revolusi di Algeria. Nasser merupakan pendukung dan penyuplai senjata FLN, bahkan pada September 1956 Angkatan Laut Perancis menahan kapal kargo Mesir yang berisi senjata bagi FLN. Terlebih kebijakan dan propaganda Nasser yang ingin menghapuskan kekuatan imperial Barat di Dunia Arab, membuat Perancis merasa terancam. Meskipun Perancis dan Inggris memiliki kepentingan berbeda di Timur Tengah, tetapi keduanya mempunyai tujuan yang sama untuk mengamankan posisi dan kepentingannya di kawasan tersebut.

Posisi Amerika Serikat berbeda dengan Inggris dan Perancis yang tidak berkepentingan menjatuhkan pemerintahan Nasser. Perhatiannya lebih kepada implikasi global nasionalisasi Terusan Suez, terutama potensi kehilangan pasokan minyak Timur Tengah dan kemungkinan intervensi Uni Soviet. Eisenhower tidak melihat penggunaan kekuatan militer sebagai solusi terbaik dan hanya akan meningkatkan resiko di Timur Tengah. Eisenhower menganggap bahwa ekonomi Eropa tidak akan bertahan bila melakukan operasi militer ke Mesir ditambah resiko Timur Tengah akan bersatu melawan Barat. Eisenhower juga memperingatkan bahwa penggunaan kekuatan hanya akan mendorong Negara Arab untuk mendapatkan persenjataan dari Uni Soviet.

4. Negosiasi

Pada Agustus 1956, di London diadakan pertemuan antara 18 negara yang mempunyai kepentingan terhadap Terusan Suez. Pertemuan ini kemudian dikenal dengan sebutan Konferensi London Pertama. Konferensi London membentuk sebuah komisi yang bertujuan untuk bertemu dengan Nasser dan mengajukan 18 butir proposal yang intinya mengajak Nasser bernegosiasi untuk mengembalikan kontrol Terusan Suez berdasarkan Konvensi Konstantinopel 1888. Pada 3 September 1956 delegasi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Australia, Robert Menzies, dikenal sebagai Komisi Menzies melakukan pertemuan dengan Nasser di Kairo. Proposal tersebut ditolak oleh Nasser yang berpendapat bahwa Mesir mempunyai hak untuk menasionalisasi setiap perusahaan yang terdaftar di Mesir.

Pada 19 hingga 21 September Konferensi London kedua berlangsung untuk membahas proposal Dulles mengenai SCUA. Mesir kembali tidak hadir yang menandakan ketidaksetujuannya dengan proyek tersebut. SCUA membuat aliansi Barat terpecah pendapat mengenai hak pembayaran kepada Mesir. Ketika Konferensi London berakhir, Lloyd dan Pinaeu sepakat bahwa SCUA tidak sesuai harapan mereka dan meninggalkan ketidakpuasan terhadap sikap Amerika Serikat. Pada 23 September 1956 akhirnya Inggris dan Perancis membawa masalah Terusan Suez ke PBB tanpa berkonsultasi dengan Amerika Serikat terlebih dahulu.

5. Invasi Tiga Negara ke Mesir

Upaya diplomasi Inggris dan Perancis untuk menyelesaikan masalah Terusan Suez dan mendapatkan dukungan internasional dalam sidang Dewan Keamanan PBB bisa dikatakan gagal. Perancis kemudian mengusulkan sebuah rencana kepada Eden untuk mengajak Israel menyerang Mesir melalui Sinai agar Inggris dan Perancis bisa mengeluarkan ultimatum kepada kedua belah pihak yang berperang untuk menarik mundur pasukannya dari Terusan Suez. Hal ini dilakukan agar Inggris dan Perancis mempunyai dalih untuk

menurunkan pasukan mereka sendiri dengan alasan mengamankan Terusan Suez.

Inggris yang pada awalnya menolak untuk melibatkan Israel akhirnya bersedia karena membutuhkan alasan politik untuk melaksanakan Operasi Musketeer. Pada 16 Oktober 1956, perwakilan Inggris, Perancis dan Israel melakukan pertemuan rahasia di Sevres, Perancis untuk membicarakan rencana rahasia menyerang Mesir. Pada 24 Oktober 1956 tercapai kesepakatan yang dikenal sebagai Protokol Sevres. Isi Protokol Sevres pada intinya adalah agar Israel bisa memberikan alasan bagi Inggris dan Perancis untuk melaksanakan Operasi Musketeer. Ketiga negara tersebut sepakat untuk melaksanakan operasi dengan urutan; tanggal 29 Oktober Israel menyerang Mesir hingga dekat Terusan Suez, tanggal 30 Oktober Inggris dan Perancis mengeluarkan ultimatum agar Mesir dan Israel menjauh dari Terusan Suez, tanggal 31 Oktober, setelah waktu tenggang ultimatum berakhir, Inggris dan Mesir melaksanakan Operasi Musketeer tahap pertama.

Pada 29 Oktober 1956, Israel melancarkan serangan ke Mesir seperti yang sudah disepakati di Protokol Sevres dengan Inggris dan Perancis. Inggris dan Perancis kemudian mengeluarkan ultimatum kepada Mesir dan Israel pada 30 Oktober 1956 yang isinya yaitu;

- a. untuk segera menghentikan aksi perang di darat, laut dan udara;
- b. menarik seluruh pasukan militer Mesir sejauh 10 mil (16 km) dari terusan;
- c. agar kebebasan perjalanan kapal seluruh bangsa terjamin dan memisahkan pihak yang berperang, Mesir harus menerima pendudukan sementara pasukan Inggris dan Perancis di posisi strategis di Port Said, Ismailia dan zona Suez.

Pemerintah Inggris dan Perancis meminta ultimatum tersebut dijawab dalam waktu 12 jam. Nasser menolak untuk mematuhi ultimatum tersebut, karena pendudukan yang dilakukan Inggris dan Perancis melanggar kedaulatan Mesir. Penolakan Nasser untuk memenuhi ultimatum Inggris dan

Perancis, menjadi lampu hijau untuk memulai Operasi Musketeer pada 31 Oktober 1956.

Pada 2 November 1956 Resolusi PBB No. 997 (ES-I) keluar yang mendesak semua pihak yang berperang melakukan genjatan senjata. Invasi Tiga Negara ke Mesir juga merupakan ujian bagi Uni Soviet untuk menunjukkan komitmennya terhadap Negara Arab. Pada 5 November 1956 Marshal Bulganin mengirim surat kepada Perdana Menteri Inggris, Perancis dan Israel dan menyatakan mereka sebagai aggressor dan menciptakan ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah. Bulganin juga memperingatkan Israel bahwa pemerintahannya telah bersiap melakukan tindakan untuk menghentikan pertempuran dan menarik Duta Besar mereka di Israel untuk kembali ke Moscow. Selain Bulganin, Eisenhower juga mengirim surat ke Ben Gurion yang menyatakan ketidakpuasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Mesir. Uni Soviet juga mengusulkan kepada PBB agar membuat pasukan bersama untuk memaksa Inggris, Perancis dan Israel mundur dari Mesir. Uni Soviet bahkan mengusulkan membuat suatu aksi militer Soviet-Amerika untuk menghentikan pertempuran di Timur Tengah. Setelah mendapatkan tekanan dari dunia internasional dan perekonomian yang semakin memburuk di dalam negeri, Inggris dan Perancis bersedia melakukan genjatan senjata pada 6 November 1956. Resolusi PBB No. 1000 (ES-I) keluar pada 5 November 1956 untuk membentuk *United Nations Emergency Force* (UNEF). Badan ini dibentuk untuk menjamin dan mengawasi genjatan senjata berjalan sesuai dengan Resolusi PBB No. 997 (ES-I). UNEF akan mengatur penarikan mundur pasukan Inggris, Perancis dan Israel dari Mesir. Kemudian, pada 3 Desember 1956 Inggris dan Perancis memutuskan untuk menarik mundur pasukannya dari Terusan Suez.

D. Kepentingan Negara-Negara Barat di Kawasan Timur Tengah dan Terusan Suez

1. Kepentingan Negara-Negara Barat di Kawasan Timur Tengah

a. Perang Dingin dan Pakta Baghdad

Salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam rangkaian konflik yang terjadi berkaitan dengan Terusan Suez tahun 1956 adalah Perang Dingin yang membagi dunia menjadi Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Pada 1950-an, Uni Soviet membuat program bantuan ekonomi dan militer dalam skala besar yang bertujuan untuk mendapatkan sekutu dan menyebarkan paham Komunis di Dunia Ketiga, khususnya kawasan Timur Tengah. Uni Soviet memanfaatkan gerakan revolusi dan anti imprealisme yang sedang tumbuh di kawasan tersebut untuk mencapai tujuannya. Meski begitu, Uni Soviet bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kondisi di Timur Tengah, Barat dalam hal ini berperan lebih besar.

Inggris yang mempunyai kepentingan ekonomi terutama masalah minyak dan Terusan Suez, dan Amerika Serikat yang mencari kesempatan ekonomi dan mencegah pengaruh Uni Soviet di Timur Tengah melalui pakta pertahanan regional di Timur Tengah. Pada 1951, Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Turki mengusulkan untuk membuat pakta pertahanan di Timur Tengah. Mesir merupakan kandidat teratas dalam daftar, karena mempunyai posisi strategis dengan keberadaan Terusan Suez. Tetapi Pemerintahan Mesir menolak karena golongan nasionalis di Mesir tidak menginginkan Mesir menjadi sekutu Barat pada Perang Dingin dan ditambah posisi Barat yang dianggap sebagai pendukung Israel. Amerika Serikat dan Inggris yang tetap berusaha mendirikan pakta pertahanan pada 24 Februari 1955 mendirikan Pakta Baghdad dengan anggota Inggris, Iraq, Pakistan dan Iran.

b. Proyek ALPHA

Konflik Arab-Israel yang terjadi di kawasan Timur Tengah dianggap pihak Barat berpotensi merusak kepentingan Barat di Timur Tengah. Oleh karena itu Barat berusaha mencari solusi menyelesaikan konflik ini. Inggris kemudian berinisiatif untuk melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik Arab-Israel dengan bekerja sama dengan Amerika Serikat. Proyek ini dikenal dengan kode ALPHA, yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik Arab-Israel dan berjalan antara tahun 1955 hingga awal tahun 1956.

Tim mediasi antara Inggris yang diwakili Evelyn Shuckburgh, dan Amerika Serikat yang diwakili Francis H. Russell dibentuk pada Desember 1954 untuk membuat rancangan perjanjian damai antara Negara Arab dan Israel. Pada Februari 1955 rancangan perjanjian damai pun selesai yang proposal utamanya mengenai konsesi wilayah di selatan Negev yang bisa menghubungkan Mesir dengan Jordania dan Arab Saudi. Amerika Serikat dan Inggris percaya bahwa kunci penyelesaian konflik Arab-Israel adalah Mesir. Fokus dalam rencana ini adalah Mesir dan Israel, dengan harapan nantinya Negara Arab yang lain akan terlibat. Didalamnya juga mempertimbangkan masalah pengungsi Palestina, dimana dengan bantuan Amerika Serikat, Israel disarankan memberikan tempat tinggal atau memberikan ganti rugi kepada pengungsi Palestina.

c. *Czech Arms Deal*

Pada 21 September 1955 Mesir menandatangani perjanjian senjata dengan Cekoslowakia untuk lima tahun. Dalam perjanjian tersebut Uni Soviet bersedia menyediakan suplai senjata bagi Mesir yang ditukar dengan kapas Mesir, selain itu Uni Soviet juga memberikan pelatihan dan pemeliharaan senjata kepada Mesir. Melalui perjanjian ini, militer Mesir bisa lebih superior dari Israel baik dalam kualitas maupun kuantitas dalam persenjataan militernya.

Amerika Serikat yang khawatir Timur Tengah, terutama Mesir, akan jatuh ke pengaruh komunis semakin mendekati kenyataan. Setelah

perjanjian tersebut, Mesir tergantung kepada bantuan militer Uni Soviet dan membuat hubungan tetap dengan Moskow. Selain itu, hal ini semakin meningkatkan potensi Perang Arab-Israel, karena Israel tidak akan tinggal diam. Israel berpendapat *Czech Arms Deal* merusak keseimbangan kekuatan di Timur Tengah dan membahayakan keamanan Israel karena konfrontasi militer semakin tidak terhindarkan. Kemudian Israel memanfaatkan isu ini untuk mendapatkan bantuan senjata dari Barat.

d. Pembangunan Bendungan Aswan

Keterlibatan Amerika Serikat dalam pembangunan Bendungan Aswan bertujuan untuk mencegah pengaruh Uni Soviet lebih jauh di Mesir dan membujuk Nasser agar lebih bekerja sama dalam proyek ALPHA untuk menyelesaikan konflik Arab-Israel. Melalui *Czech Arms Deal*, posisi monopoli persenjataan Amerika Serikat di Timur Tengah mendapat saingan, sekaligus menjadi propaganda Nasser bahwa dirinya bebas dari pengaruh Barat.

Pembangunan Bendungan Aswan sangat penting bagi pemerintahan Nasser karena dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Mesir. Bendungan Aswan akan memiliki ketinggian 384 kaki dan panjang 3 mil. Pemanfaatannya untuk pembangkit listrik dapat menghasilkan 10.000 watt per tahun, dan sebagai irigasi Bendungan Aswan dapat meningkatkan produksi pertanian Mesir. Bendungan Aswan juga dibangun untuk mengendalikan banjir yang disebabkan meluapnya Sungai Nil. Selain itu bagi Mesir, Bendungan Aswan merupakan proyek terbesar setelah piramida dan akan menjadi simbol baru dan kebanggaan nasional Mesir.

2. Kepentingan Negara Barat dan Israel terhadap Mesir dan Terusan Suez

a. Kepentingan Inggris

Inggris merupakan salah satu kekuatan yang paling berkepentingan di Timur Tengah, dan setelah kejatuhan kekaisaran Ottoman Inggris

menempati posisi dominan di kawasan Timur Tengah. Kepentingan Inggris di Timur Tengah bisa dibagi menjadi dua kategori yaitu kepentingan politik dan ekonomi. Tujuan politik Inggris di Timur Tengah pada awalnya berkaitan dengan penjagaan dan pengawasan India. Setelah pembangunan Terusan Suez selesai tahun 1869, kepentingan Inggris di kawasan Timur Tengah terus meningkat. Terusan Suez mempercepat waktu yang ditempuh untuk mencapai India dan wilayah kekuasaan Inggris lainnya di timur Suez, dan hal ini menjadi sangat penting bagi perdagangan Inggris. Artinya segala gangguan terhadap pelayaran melalui Terusan Suez akan mempengaruhi ekonomi dan perdagangan Inggris. Kepentingan Inggris semakin meningkat setelah ditemukannya minyak di Iran dan negara-negara Timur Tengah lainnya.

Secara ekonomi, Terusan Suez meningkatkan penghasilan industri pelayaran hingga empat puluh persen. Rute pelayaran Inggris antara Kalkuta ke Liverpool dengan melewati Tanjung Harapan rata-rata menempuh jarak 11.650 mil, sedangkan dengan melewati Terusan Suez jarak yang ditempuh berkisar hingga empat puluh lima persen menjadi sekitar 6.400 mil. Sejak tahun 1875 Pemerintah Inggris memegang 44 persen saham *Suez Canal Company*, dengan jumlah saham sebesar ini menghasilkan pemasukan yang sama besar dengan pemasukan dari pajak. Disamping itu, Inggris dan Perancis sangat tergantung terhadap minyak dari Timur Tengah untuk menjalankan ekonominya. Ladang minyak di Timur Tengah menghasilkan 145 juta ton per tahun, dan hampir setengah minyak tersebut melewati Terusan Suez ke Eropa pada tahun 1955.

Pasca Perang Dunia II, banyak wilayah kolonial Inggris yang melepaskan diri. Hal ini menimbulkan kesan bahwa Inggris sudah mengalami kemunduran dan kehilangan status sebagai salah satu kekuatan dunia, terutama setelah Inggris mundur dari India. Secara politik, Inggris berkepentingan untuk tetap menguasai Mesir dan Terusan Suez untuk menjaga wibawanya di mata dunia internasional. Dengan bertanggung jawab menjaga keamanan Terusan Suez dan menjaga pertahanan kawasan

Timur Tengah dari pengaruh Uni Soviet, Inggris ingin menunjukkan bahwa mereka masih merupakan salah satu pemain utama dalam hubungan internasional. Terusan Suez mempunyai peran penting dalam strategi luar negeri Inggris. Terusan Suez menghubungkan Inggris dengan pangkalan militer Afrika Timur, Commonwealth di Pasifik, dan sekutu-sekutu Inggris.

b. Kepentingan Perancis

Pasca Perang Dunia II Perancis berusaha mengembalikan wibawa dan kebanggaan nasional setelah kalah dari NAZI Jerman. Karena itu Perancis sangat agresif melawan perang revolusi yang terjadi di koloninya, seperti yang terjadi di Indocina. Hal ini pun berakhir dengan kekalahan Perancis di Dien Bien Phu dan kehilangan koloninya di Indocina. Setidaknya ada dua motif mengapa Perancis melakukan intervensi terhadap Mesir, yang pertama perang revolusi di Algeria. Bagi Perancis Algeria bukan koloni biasa yang sudah dianggap sebagai wilayah sendiri. Hal ini dikarenakan banyaknya orang Perancis yang tinggal dan bekerja disana, serta masalah kultural dan ekonomi juga sudah membaur dengan Algeria.

Pada November 1954 gerakan revolusi di Algeria yang menamakan diri *Front de Liberation Nationale* (FLN) muncul dan mendapatkan bantuan persenjataan dari Mesir dibawah pemerintahan Nasser. Pada September 1956 Perancis menghentikan kapal kargo Mesir yang mengangkut persenjataan untuk FLN. Perdana Menteri Guy Mollet sendiri sering menyamakan Nasser dengan sosok Hitler, sehingga menimbulkan ketakutan sendiri terhadap Perancis. Negosiasi yang dilakukan Perancis agar Nasser menghentikan bantuan persenjataan gagal dan Nasser tetap menyalurkan persenjataan kepada FLN.

Motif yang kedua adalah adanya *Munich Syndrome*, yaitu adanya persepsi dari Perancis yang sering menyamakan Nasser dengan Hitler dan situasi tahun 1956 dengan 1930an ketika Jerman mulai melakukan invasi

dan memulai Perang Dunia II. Hal ini menimbulkan kebencian terhadap Nasser efektif diantara pemerintahan dan jurnalis Perancis yang menjadikan *Munich Syndrome* sebagai pbenaran dan slogan untuk melakukan tindakan terhadap Nasser.

c. Kepentingan Israel

Kepentingan Israel di Timur Tengah adalah untuk menjaga keamanan nasional karena perlawanan dari dunia Arab. Masalah keamanan ini menjadi faktor kunci kebijakan luar negeri Israel. Hal ini mengharuskan Israel memimpin dan mengungguli kekuatan militer negara-negara Arab, untuk itu Israel terus mencari persediaan senjata dan jaminan keamanan dari negara lain. Pada waktu itu David Ben Gurion (Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Israel tahun 1948-1953), mempunyai pandangan umum mengenai keamanan negara yang harus dicapai, termasuk kekuatan militer, pemukiman penduduk, teknologi canggih, dan ilmu pengetahuan. Pandangan ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu perasaan terisolasi, dan negara-negara Arab yang tidak bisa menerima keberadaan negara Israel. Untuk itu Israel terus mencari dukungan dan menjalin hubungan dengan negara-negara kuat yang bisa memberikan jaminan keamanan dan ekonomi termasuk Inggris dan Perancis.

Israel juga memiliki kepentingan terkait pembukaan pelabuhan Eilat setelah tahun 1949 Mesir menutup Terusan Suez bagi kapal Israel. Ditutupnya Terusan Suez membuat Israel harus melewati Selat Tiran untuk mencapai Laut Merah dan mengadakan kontak dengan Afrika dan Timur Jauh. Selat Tiran merupakan selat yang menghubungkan Teluk Aqabah dan Laut Merah. Karena itu pelabuhan Eilat menjadi sangat penting bagi Israel sehingga Israel tidak perlu memutari Afrika Selatan untuk mencapai Afrika dan Timur Jauh. Pada 13 September 1955 Mesir mengeluarkan peraturan yang mengharuskan setiap kapal yang melewati Teluk Aqabah mendapatkan izin dari Mesir. Mesir juga menempatkan

pasukan militer untuk memblokade kapal Israel yang melewati Teluk Aqabah sehingga akses pelayaran dan perdagangan Israel ke Laut Merah terhambat.

E. Dampak Nasionalisasi Terusan Suez Tahun 1956

Nasionalisasi Terusan Suez dan kegagalan operasi militer Inggris dan Perancis ke Mesir mengakibatkan status keduanya sebagai negara imperial terus jatuh. Setelah kehilangan India, Inggris kehilangan Terusan Suez yang merupakan rute laut paling strategis yang dimiliki oleh Inggris. Hal ini menimbulkan masalah ekonomi terkait dengan kepentingan perdagangan dengan Timur Jauh dan kepentingan minyak di kawasan Timur Tengah. Perancis di lain pihak juga kehilangan pengaruh di daerah koloninya setelah mengalami kekalahan berturut-turut selain kekalahan dari Mesir. Dimulai kekalahan di Vietnam tahun 1954, masalah di Afrika Utara seperti kekalahan di Tunisia dan Maroko tahun 1956, selain itu Perancis harus menghadapi perlawanan revolusi Algeria. Era dekolonialisasi dan penentuan nasib sendiri dunia ketiga mencapai puncaknya.

Konflik yang terjadi karena nasionalisasi Terusan Suez memperlihatkan bahwa Inggris dan Perancis tidak bisa lagi melakukan tindakan militer tanpa dukungan Amerika Serikat. Invasi ke Mesir yang tanpa persetujuan Amerika Serikat membuat hubungan antara keduanya terganggu. Amerika Serikat menolak memberi bantuan ekonomi sebelum Inggris mundur dari Mesir. Krisis ekonomi yang dihadapi mengharuskan Inggris untuk melakukan pinjaman kepada IMF (*International Monetary Fund*) juga terkendala persetujuan dari Amerika Serikat. Penutupan Terusan Suez juga mengakibatkan terganggunya pengapalan minyak ke Inggris yang berdampak pada krisis minyak Eropa. Inggris terpaksa membeli minyak ke Amerika Serikat dalam Dollar Amerika, dan ongkos pengangkutan yang lebih mahal karena jarak yang lebih jauh. Tetapi dampak jangka panjang dari peristiwa ini berhasil mengurangi ketergantungan Inggris terhadap Terusan Suez. Hal ini karena Inggris mulai membuat kapal *supertanker* yang membuat biaya pengangkutan minyak lebih ekonomis dibanding dengan kapal kecil, bahkan jika harus melalui jalur Tanjung Harapan sekalipun.

Perancis juga mengalami hal serupa dengan Inggris, anggaran negara yang defisit karena harga impor minyak tinggi, terjadi inflasi dan melemahnya mata uang Perancis. Kegagalan Perancis dalam Perang Suez juga berdampak pada keadaan politik domestik Perancis. Jatuhnya Republik Keempat Perancis digantikan oleh Jenderal de Gaulle pada 1 Juni 1958 merupakan akibat dari kegagalan pemerintah mengatasi masalah Revolusi Algeria. Salah satu alasan Perancis menyerang Mesir karena Nasser menyediakan senjata pada FLN. Pemerintahan Perancis percaya bahwa menjatuhkan Nasser merupakan kunci untuk mengatasi masalah di Algeria. Jenderal de Gaulle sendiri cenderung menyalahkan Inggris dan Amerika Serikat terhadap kegagalan di Perang Suez. Jenderal de Gaulle melihat bagaimana Inggris begitu tergantung pada Amerika Serikat. Inggris terlihat tidak mampu menentang kebijakan Amerika Serikat karena alasan ekonomi. Setelah nasionalisasi Terusan Suez, Perancis dibawah pemerintahan Jenderal de Gaulle memilih untuk menjauh dari NATO dan menentukan kebijakan secara independen termasuk masalah program nuklir Perancis.

Mesir dan Dunia Arab memandang nasionalisasi Terusan Suez pada 26 Juli 1956 sebagai simbol kebebasan Mesir dari pengaruh politik dan ekonomi asing, juga kebebasan Mesir untuk menentukan nasibnya sendiri. Nasser dianggap sebagai pahlawan Arab sebagai pemimpin yang berhasil melawan negara imperialis dan meninggalkan kesan yang kuat bagi Dunia Arab. Nasser membawa kehormatan dan kepercayaan diri kepada Dunia Arab dan negara dunia ketiga. Kemenangan politik Nasser bagi Bangsa Arab sangat nyata dan tidak terbantahkan dengan fakta penarikan mundur pasukan Inggris dan Perancis dari Terusan Suez tanpa mencapai hasil yang dituju, pengunduran diri Eden dari jabatan Perdana Menteri Inggris, jatuhnya Pemerintahan Mollet di Perancis, dan mundurnya Israel dari Sinai dan Jalur Gaza tanpa mempengaruhi kedaulatan Mesir. Bagi Nasser, krisis yang terjadi merupakan ujian bagi legitimasi kekuasaan dan keputusannya menasionalisasi Terusan Suez. Kesuksesannya tersebut menjadikan Nasser muncul sebagai pemimpin kharismatik Mesir dan Dunia Arab. Konsep Nasser tentang Nasionalisme Arab memberi pengaruh terhadap kejadian

politik Arab dan periode setelah nasionalisasi Terusan Suez merupakan masa keemasan Nasionalisme Arab dengan puncaknya deklarasi berdirinya *the United Arab Republic* (UAR) antara Mesir dan Syiria pada 1 Februari 1958.

Nasionalisasi Terusan Suez mempunyai dampak ekonomi bagi Mesir. Setidaknya ada dua dampak ekonomi jangka pendek yang dihadapi oleh Mesir. Pertama, dibekukannya aset dan mata uang Mesir di Inggris, Perancis dan Amerika Serikat, ditambah dihentikannya semua bantuan dari Amerika Serikat. Kedua, adanya embargo ekonomi dari Inggris yang merupakan mitra dagang paling penting bagi Mesir. Terlebih pemblokiran Terusan Suez dari November 1956 hingga April 1957 semakin memperburuk perekonomian Mesir.

Pemulihan masalah ekonomi yang dihadapi akibat Nasionalisasi Terusan Suez berjalan cepat dengan dibukanya kembali Terusan Suez pada 10 April 1957. Negosiasi pemulihan hubungan ekonomi dengan Inggris, Perancis dan Amerika juga berlangsung relatif cepat. Pada Mei 1958 tercapai kesepakatan antara *Suez Canal Company* dan Mesir, dimana pemerintah Mesir membayar kompensasi nasionalisasi Terusan Suez sebesar 26,5 juta Poundsterling. Kesepakatan Ekonomi dengan Perancis tercapai ditandatangani pada 22 Agustus 1958, sedangkan penyelesaian dengan Inggris baru tercapai pada Februari 1959. Dari sudut pandang Mesir, penyelesaian masalah ekonomi akibat nasionalisasi Terusan Suez berakhir dengan memuaskan dan cepat. Hal ini bisa terjadi karena faktor ekonomi dan politik ketika itu; pentingnya Terusan Suez bagi dunia pelayaran, kepentingan ekonomi Barat yang mengharuskan mereka melanjutkan perdagangan dengan Mesir, dan ketakutan negara Barat jika Mesir akan jatuh ke dalam pengaruh Ekonomi Uni Soviet.

Keberhasilan Israel dalam Perang Sinai berhasil meningkatkan keamanan wilayah dan posisi internasional Israel. Kemenangan militer pada Perang Sinai juga memberikan rasa aman bagi Israel karena sebelumnya mereka percaya jika Nasser mempunyai rencana untuk menyerang Israel. Hal ini memungkinkan Israel untuk lebih berkonsentrasi terhadap kebijakan internalnya seperti pembangunan ekonomi, investasi dalam bidang sains dan pendidikan, dan peningkatan pelayanan sosial di Israel. Peristiwa nasionalisasi Terusan Suez menandai

perubahan hubungan antara Israel, Negara Arab, dan negara superpower. Konflik Arab-Israel berubah bentuk dari masalah perbatasan dan pengungsi Palestina menjadi masalah perjuangan untuk kekuasaan dan hegemoni antar negara. Hal ini tidak terlepas dari peran propaganda Nasser melalui nasionalisme Arab.

Krisis yang terjadi antara Oktober 1956-Maret 1957 sangat berdampak terhadap orientasi kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah. Peristiwa ini membuat Amerika Serikat menjadi kekuatan utama di Timur Tengah menggantikan Inggris dan Perancis. Kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah nasionalisasi Terusan Suez cenderung mengabaikan masalah konflik Arab-Israel, tetapi mencoba mengalihkan perhatian Israel dan negara Arab kepada musuh bersama yaitu komunis. Fokus kebijakan Amerika Serikat lebih kepada ancaman pengaruh Uni Soviet di Timur Tengah, dan membuat kawasan stabil yang pro Barat. Eisenhower mengumumkan kebijakan baru untuk membantu negara-negara non-komunis di Timur Tengah yang dikenal dengan doktrin Eisenhower. Doktrin ini bertujuan untuk mendapatkan loyalitas dari rezim regional lewat bantuan ekonomi dan militer. Eisenhower menjelaskan bahwa melemahnya Inggris dan Perancis menciptakan kekosongan kekuasaan di Timur Tengah yang harus diisi oleh Amerika Serikat. Dulles kemudian menambahkan bahwa kekosongan kekuasaan di Timur Tengah setelah invasi Inggris, Perancis dan Israel sangat berbahaya. Jika Amerika Serikat tidak melakukan sesuatu, hampir pasti Timur Tengah akan jatuh dalam pengaruh komunis. Setelah peristiwa nasionalisasi Terusan Suez Amerika Serikat melihat konflik yang terjadi di Timur Tengah tidak lagi sekedar konflik regional semata, tetapi telah menjadi isu Perang Dingin dengan Uni Soviet.

F. Kesimpulan

Nasionalisasi Terusan Suez merefleksikan konflik antara dua sistem; kekuasaan sebelum Perang Dunia II dimana sistem kolonial dan ketidaksetaraan internasional yang dominan, dengan negara koloni yang baru muncul dengan menuntut persamaan dan kedaulatan penuh. Usaha Inggris untuk merebut kembali statusnya tersebut terhadap Terusan Suez berakhir bencana bagi posisinya di

Mesir dan Timur Tengah. Begitu pula dengan Perancis yang tujuanya menyerang Mesir untuk menghentikan bantuan Nasser terhadap FLN tidak berhasil. Kegagalan Inggris dan Perancis dalam Perang Suez mendorong dekolonisasi wilayah kekuasaannya sekaligus mempercepat proses mundurnya Inggris dan Perancis sebagai kekuatan utama di dunia digantikan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet yang bersaing dalam Perang Dingin.

Daftar Pustaka

Buku:

- Almog, Orna (2003). *Britain, Israel and the United States 1955—1958: Beyond Suez*. London: Frank Cass Publishers.
- Bella s. Galil, “The Suez Canal”, dalam H. J. Dumont (ed). *Monographiae Biologicae Vol. 83: Bridging Divides Maritime Canals as Invasion Corridors*, Dordrecht: Springer, 2006,
- Bogle, Emory C. (1996). *The Modern Middle East: From Imperialism to Freedom 1800-1958*. New Jersey: Prentice Hall.
- Cohen, Michael J. (2005). *Strategy and Politics in the Middle East 1954-1960: Defending the Northern Tier*. New York: Frank Cass.
- Divine, Robert A. (1981). *Eisenhower and the Cold War*. Oxford: Oxford University Press.
- Dudung Abdurrahman. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Fraser, T. G. (1980). *The Middle East, 1914-1979*. London: Edward Arnold Ltd.
- Gottschalk, Louis. (1975). “Understanding History: A Primer of Historical Method”, a.b., Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Helius Sjamsuddin dan Ismaun. (1993). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Depdikbud.
- Hopwood, Derek. (1982). *Egypt: Politics and Society 1945-1981*. London: George Allen&Unwin.
- Jurusan Pendidikan Sejarah. (2006). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah, FISE UNY.
- Kuntowijoyo. (1994). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- _____ (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Kunz, Diane B. (1991). *The Economic Diplomacy of the Suez Crisis*. Chapel Hill and London: The University of North Carolina Press.
- Longgood, William F. (1958), *Suez Story: Key to the Middle East*. New York: Greenberg Publisher.

- Louis, W.M. Roger dan Roger Owen (ed.). (1989). *Suez 1956: the Crisis and Its Consequences*. Oxford: Oxford University Press.
- Mansfield. (1956). *Nasser Egypt: Rev. Edition*. London: Penguin Books
- Marsot, Afaf Lutfi Al-Sayyid. (2007). *A History of Egypt: From the Arab Conquest to the Present*. New York: Cambridge University Press.
- McNamara, Robert. (2003). *Britain, Nasser and the Balance of Power in the Middle East 1952-1967*. London: Frank Cass Publishers.
- Noring, Nina J. (1990). *Foreign Relations of the United States 1956-1957 Vol. XVI: Suez Crisis, July 26- December 31, 1956*. Washington: United States Government Printing Office.
- Pearson, Jonathan. (2003). *Sir Anthony Eden and the Crisis Suez Reluctant Gamble*. New York: Palgrave Macmillan.
- Sartono Kartodirdjo. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Sidi Gazalba. (1996). *Pengantar Ilmu Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Stiver, William. (1986). *America's Confrontation with Revolutionary Change in the Middle East, 1948-83*. London: Macmillan Press.
- Varble, Derek. (2003). *Essential Histories: The Suez Crisis 1956*. Oxford: Osprey Publishing.
- Wilson, Arnold T. (1939). *The Suez Canal: It's Past, Present, and Future*. London: Oxford University Press.

Jurnal:

- Basyar. (1986). “Bagaimana Milliter Menguasai Mesir?”, dalam *Jurnal Ilmu Politik* 3, No. 3. Jakarta: Gramedia.
- Bowie, Robert R. (1989). “Eisenhower, Dulles and the Suez Crisis”, dalam WM. Roger Louis dan Roger Owen (ed.). *Suez 1956: The Crisis and Its Consequences*. Oxford: Oxford University Press.
- Dessouki, Ali E. Hilal. (1989). “Nasser and Struggle for Independence”, dalam WM. Roger Louis dan Roger Owen (ed.). *Suez 1956: The Crisis and Its Consequences*. Oxford: Oxford University Press.

- Fry, Michael G. (1989). "Canada, the North Atlantic and the UN", dalam WM. Roger Louis dan Roger Owen (ed.). *Suez 1956: The Crisis and Its Consequences*. Oxford: Oxford University Press.
- Galil, Bella s. (2006). "The Suez Canal", dalam H. J. Dumont (ed). *Monographiae Biologicae Vol. 83: Bridging Divides Maritime Canals as Invasion Corridors*. Dordrecht: Springer.
- Hourani, Albert. (1989). "Conclusion", dalam WM. Roger Louis dan Roger Owen (ed.). *Suez 1956: The Crisis and Its Consequences*. Oxford: Oxford University Press.
- Khalidi, Rhasid. (1989). "Consequences of Suez in the Arab World", dalam WM. Roger Louis dan Roger Owen (ed.). *Suez 1956: the Crisis and Its Consequences*, Oxford: Oxford University Press.
- Morewood, Steve. (2003). "Prelude to the Suez Crisis: The Rise and Fall of British Dominance over the Suez Canal", dalam Simon C. Smith (ed.). *Reassessing Suez 1956: New Perspectives on the Crisis and its Aftermath*. Hampshire: Ashgate Publishing Ltd.
- Owen, Roger. (1989). "The Economic Consequences of the Suez Crisis for Egypt", dalam WM. Roger Louis dan Roger Owen (ed.). *Suez 1956: The Crisis and Its Consequences*. Oxford: Oxford University Press.
- Rabin, Yitzhak dan Shlomo Avineri. (1990). "The Sinai Campaign and the Limits of Power" dalam SI. Troen dan M. Shemes (ed.). *The Suez Sinai Crisis 1956: Retrospective and Reappraisal*. London: Frank Cass.
- Schulzinger, Robert D. (1990). "The Impact of Suez on United States Middle East Policy, 1957-1958", dalam SI. Troen dan M. Shemes (ed.). *The Suez Sinai Crisis 1956: Retrospective and Reappraisal*. London: Frank Cass.
- Selak Jr, Charles B. (1955). "The Suez Canal Base Agreement of 1954: its Background and Implication", dalam *The American Journal of International Law* Vol. 49 No. 4 (Oct 1955), Washington DC: American Society of International Law.
- Shamir, Shimon. (1989). "The Collapse of Project Alpha", dalam WM. Roger Louis dan Roger Owen (ed.). *Suez 1956: The Crisis and Its Consequences*. Oxford: Oxford University Press.
- Shemesh, Moshe. (1990). "Egypt: From Military Defeat to Political Victory", dalam SI. Troen dan M. Shemes (ed.). *The Suez Sinai Crisis 1956: Retrospective and Reappraisal*. London: Frank Cass.

- Vaisse, Maurice. (1989). "France and the Suez Crisis", dalam WM. Roger Louis dan Roger Owen (ed.). *Suez 1956: The Crisis and Its Consequences*. Oxford: Oxford University Press.
- _____. (1989). "Post-Suez France", dalam WM. Roger Louis dan Roger Owen (ed.). *Suez 1956: The Crisis and Its Consequences*. Oxford: Oxford University Press.
- Warner, Geoffrey. (1979). "'Collusion' and the Suez Crisis of 1956", dalam *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)*, Vol. 55 No. 2. London: Catham House.
- Watson, Adam. (1989). "The Aftermath of Suez: Consequences for French Decolonization", dalam WM. Roger Louis dan Roger Owen (ed.). *Suez 1956: The Crisis and Its Consequences*. Oxford: Oxford University Press.

Skripsi:

- Insaf, Atmani Samia. (2008). The Suez Crisis 1956: American Attitudes and Policies. *Skripsi*. Algeria: Mentoury University of Constantine.
- Krida Amalia Husna. (2010). Gamal Abdul Nasser dan Perannya dalam Penentuan Kebijakan Mesir (1952-1970). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Tazir, Ahmad. (2010). Post Second World War British Foreign Policy in the Middle East, Case Study: The Suez Crisis 1956. *Skripsi*. Algeria: Mentoury University of Constantine.
- Pierre, Jean-Marc. (2004). The Suez Crisis and United Nations. *Skripsi*. Kansas: Faculty of the US Army Command and General Staff College.

Internet:

- A Short History of NATO. Tersedia dalam <http://www.nato.int/history/nato-history.html>, diakses tanggal 10 Februari 2013 pukul 02.00 WIB.
- Saleh Lapadi. (2009) "Terkuaknya Pengkhianatan Arab Saudi",** <http://www.muhsinlabib.com/analisis/pengkhianatan-saudi-arabia>. diakses pada 26 Juli 2013 pukul 22.20 WIB.